

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau penduduk yang tidak mampu mencukupi tingkat kebutuhan dan kemakmuran yang dimana itu dianggap sebagai kebutuhan yang minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan yang dimana dalam kebutuhan tidak mempunyai uang dan barang untuk memenuhi tingkat kalangsungan hidup. Menurut World bank (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan, pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).

Disamping itu kemiskinan berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan sebagai miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata

lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinir dan terintegrasi (*www.bappenas.go.id*)

Kemiskinan ini identik dengan negara berkembang yang dimana suatu negara yang jumlah penduduk semakin banyak maka akan mempengaruhi jumlah lapangan pekerjaan yang semakin sedikit disebabkan oleh jumlah penduduk negara yang semakin banyak, sehingga jumlah kemiskinan yang semakin banyak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan negara sedang berkembang yang sulit maju. Kesamaan karakteristik negara sedang berkembang pada umumnya, tingkat pendapatan nasional negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya pun tergolong lambat. Dicontohkan pada negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak dan tingkat pengangguran pun tinggi. (*Bppd 2007*)

Di Negara Indonesia kegagalan sistem pemerintah dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di dalam Negara berkembang. Maraknya kegiatan korupsi yang dilakukan secara besar-besaran merupakan salah satu penyebab kemiskinan yang paling nyata yang terjadi di dalam Negara Indonesia lalu dibarengi dengan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan bahaya dari budaya korupsi yang membuat korupsi adalah budaya yang biasa terjadi sehingga menambah buruk tingkat kemiskinan dalam Negara Indonesia. Korupsi menyebabkan dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan akan sangat kecil sekali

bagian yang dapat langsung sampai dan terserap oleh masyarakat sehingga dampak dari pengalokasian dana yang dilakukan pemerintah tidak mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara maksimal..

Perkembangan paradigma pembangunan yang terjadi pada banyak negara di dunia, berimbas juga ke Indonesia. Pada kenyataannya, dari tahun ke tahun pembangunan manusia di Indonesia kurang tergarap. Hal ini terbukti dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan jumlah pendidikan buta huruf. Adapun jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2008 sebesar 49,53 jiwa sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 50,35 jiwa, sedangkan untuk jumlah penduduk perempuan pada tahun 2009 sebesar 50,47 jiwa dan untuk jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 49,65 jiwa. Adapun jumlah pendidikan menurut buta huruf pada tahun 2009 sebesar 7,42 jiwa sedangkan untuk tahun 2012 jumlah penduduk menurut buta huruf sebesar 6,75 jiwa (BPS-RI, Susenas 2003-2013)

Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam pendidikan masa depan bangsa. jika dunia pendidikan suatu bangsa sudah jeblok, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab pendidikan menyangkut pembangunan karakter sekaligus mempertahankan jadi diri manusia. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan, dan kebodohan identik dengan kemiskinan.

Bank Dunia dalam Laporan Monitoring Global tahun 2012-2013 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memainkan peran sentral dalam upaya menurunkan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan global. Bisa dikatakan bahwa pengurangan penduduk miskin tidak mungkin dilakukan jika ekonomi tidak berkembang. Pertumbuhan ekonomi adalah syarat utama dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang semakin banyak yaitu dengan membangun sarana pendidikan, kesehatan, yang akan menunjang keberhasilan penduduk sebagai bekal kedepannya kelak, sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang semakin banyak dan kedepannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin hari semakin maju.

Arsyad (2006) mengelompokkan indikator pembangunan menjadi indikator moneter dan indikator nonmoneter. Indikator moneter terdiri atas pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih (*net economic welfare*). Sedangkan indikator nonmoneter terdiri atas indikator sosial, indeks pembangunan manusia (IPM), dan indikator campuran. Dalam hal ini indikator campuran meliputi aspek-aspek yaitu, pendidikan, kesehatan, pengangguran, tingkat konsumsi per kapita dan, akses kebutuhan dasar. Berhubungan dengan hal tersebut, indikator makro ekonomi seperti kesempatan kerja, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia akan menentukan kualitas dari pembangunan ekonomi dan menguji seberapa besar keberpihakan pembangunan tersebut dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu modal untuk mendapatkan kesejahteraan bagi Negara dalam skala besar dan kesejahteraan diri sendiri dalam skala kecil. Jika tingkat pendidikan dalam suatu Negara rendah maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat. Dengan kurangnya modal pendidikan yang dimiliki, maka masyarakat sebagai pribadi pelaku ekonomi hanya mampu berusaha di dalam satu bidang pekerjaan saja untuk membiayai kehidupan mereka dan masyarakat tidak memiliki tingkat intelektual yang tinggi untuk mengembangkan usaha dibidang ekonomi lainnya. Terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan yang dimana tingkat kemiskinan dapat dikurangi dengan semakin bertambah banyak pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km², terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah.

Dapat diketahui kemiskinan lebih cepat tumbuh di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan karena, pertama, krisis cenderung memberi pengaruh terburuk kepada beberapa sektor ekonomi untuk wilayah perkotaan, seperti konstruksi, perdagangan dan perbankan yang membawa dampak negatif terhadap pengangguran di perkotaan, kedua penduduk pedesaan dapat memenuhi tingkat subsistensi dari produk mereka sendiri. Dapat dilihat pada tabel 1.1 data kemiskinan menurut kabupaten/Kota DIY mulai tahun 2007 sampai tahun 2012 ini tiap tahunnya semakin berkurang yang disebabkan kebutuhan yang menjadi bagian dari masyarakat di Daerah DIY sangatlah mencukupi, sehingga jumlah masyarakat yang semakin banyak dapat diatasi dengan baik dan tidak mengaitkan masyarakat yang kekurangan akan kebutuhan untuk kedepannya.

Adapun data tentang jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan menurut Kabupaten/Kota DIY dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini, menunjukkan bahwa tiap daerah/wilayah mempunyai jumlah penduduk miskin yang sangat berbeda untuk tiap tahunnya. Dengan adanya data tentang jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan Kabupaten/Kota DIY pada tabel dibawah ini dapat melihat sejauh mana angka penduduk yang lahir, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan pada tiap wilayah/daerah, sehingga dengan adanya data tersebut mampu mengatasi persoalan yang ada pada penduduk tersebut.

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Miskin Dan Garis Kemiskinan
Menurut kabupaten/kota DIY
Tahun 2007-2012

Kabupaten	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Jumlah	%										
Kulonprogo	103.820	28,61	97.920	26,85	89.910	24,65	90.000	23,15	92.800	23,62	92.400	23,32
Bantul	169.320	19,43	164.330	18,54	158.520	17,64	14.690	16,09	159.400	17,28	158.800	16,97
Gunungkidul	192.070	28,90	173.520	25,96	163.670	24,44	14.870	22,05	157.100	23,03	156.500	22,72
Sleman	125.350	12,56	125.050	12,34	117.530	11,45	117.000	10,7	117.300	10,61	116.800	10,44
Yogyakarta	42.930	9,78	48.110	10,81	45.290	10,05	37.800	9,75	37.700	9,62	37.600	9,38
DIY	633.500	18,99	608.930	18,02	574.920	16,86	540.400	16,83	564.300	16,14	562.100	15,88

Sumber : BPS, Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta (2007-2012)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun 2007-2012 di DIY mengalami penurunan untuk jumlah penduduk miskin untuk wilayah/daerah yang berada di DIY. Jika dilihat jumlah penduduk miskin untuk Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2007 sebesar 103.820 jiwa dan di tahun 2012 mengalami penurunan untuk jumlah penduduk miskin sebesar 92.400 jiwa, untuk Kabupaten Bantul jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebesar 169.320 jiwa dan di tahun 2012 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 158.800 jiwa, untuk Kabupaten Gunungkidul jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebesar 192.070 jiwa dan di tahun 2012 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 156.500 jiwa, untuk Kabupaten Sleman jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebesar 125.350 jiwa, dan di tahun 2012 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan untuk 116.800 jiwa, untuk Kabupaten Yogyakarta jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebesar 42.930 jiwa dan di tahun 2012 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 37.600 jiwa, untuk kota DIY jumlah

penduduk miskin pada tahun 2007 sebesar 633.500 jiwa, dan di tahun 2012 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 562.100 jiwa.

Penjelasan tabel diatas dapat diketahui pada tiap-tiap daerah/wilayah jumlah kemiskinan dari tahun 2007-2012 dapat berkurang untuk tiap tahun sehingga dapat mengurangi pengangguran dan akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin yang tadinya semakin banyak dapat dikurangi dengan segala kebutuhan penduduk untuk mencukupi kebutuhan hidup, dengan cara menyediakan apa yang menjadi salah satu kebutuhan hidup penduduk yang dimana salah satu kebutuhan hidup penduduk tersebut yaitu sandang, papan, pangan, dan infrastruktur yang memadahi sehingga penduduk dapat sejahtera.

Jumlah tingkat penduduk yang semakin banyak maka akan berdampak pada pengurangan penduduk yang bekerja dan akan menyebabkan banyak tingkat pengangguran, maka semakin banyak tingkat kemiskinan akan menimbulkan jumlah kematian yang semakin banyak. Untuk mencegah hal ini maka pemerintah harus bergegas mengambil keputusan untuk menangani permasalahan yang berada pada masyarakat dengan cara menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat untuk kesejahteraan sehingga dapat menutupi kebutuhannya sehari-hari.

Salah satu cara pemerintah dalam penanganan kendala masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari yaitu mendata masyarakat yang mengalami kekurangan bahan pangan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara, pemerintah menyediakan kebutuhan masyarakat yang tidak mampu untuk

memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu kebutuhan masyarakat yang paling utama untuk menutupi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan sandang, pangan, papan yang mencukupi untuk mengurangi persoalan dalam masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan di DIY
2. Bagaimana pengaruh jumlah Unit Usaha terhadap tingkat kemiskinan di DIY
3. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di DIY
4. Bagaimana pengaruh jumlah Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di DIY.

C. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah di atas dalam penelitian ini, maka penulis memberi batasan masalah tentang hal-hal yang mempengaruhi kemiskinan di DIY yaitu apakah terdapat pengaruh secara signifikan dari variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Unit Usaha, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran terhadap Kemiskinan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Mengidentifikasi Pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan di DIY
2. Mengidentifikasi pengaruh Unit Usaha terhadap tingkat kemiskinan di DIY
3. Mengidentifikasi laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di DIY
4. Mengidentifikasi jumlah Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di DIY.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain meliputi:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Sebagai salah satu tambahan teori yang telah ada sehubungan dengan masalah yang diteliti.
 - b. Sebagai bahan untuk menambah wacana kepustakaan, baik di tingkat fakultas maupun ditingkat universitas.
 - c. Sebagai salah satu sumber untuk melakukan peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis antara lain:

- a. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan.
- b. Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.